



Hambatan Struktural Integrasi Ekonomi ASEAN: Analisis Non-Tariff Barriers, Kesenjangan Pembangunan, dan Disfungsi ASEAN Way dalam ASEAN Economic Community (2015–2024)

Bagas M. Hutagalung

Universitas Riau

Marcel Khairan

Universitas Riau

Muhammad Uwais

Universitas Riau

Otniel Widagdo

Universitas Riau

Tita Syafira.S

Universitas Riau

Alamat : Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293, Indonesia

Korespondensi penulis: bagas.maulana2857@student.unri.ac.id

Abstract. *Regional economic integration remains a central strategy for enhancing global competitiveness, as embodied by the ASEAN Economic Community (AEC), which aims to establish a single market and production base in Southeast Asia. However, the level of ASEAN integration remains significantly low compared to other regions, with intra-ASEAN trade stagnating at 21.2% of total trade in 2024. This study aims to analyze the structural factors hindering ASEAN economic integration and to formulate policy recommendations for strengthening the AEC post-2025. This research employs a qualitative approach using a literature review method and is grounded in Amitav Acharya's Social Constructivism theory (2009). The results show that low integration is caused by the proliferation of non-tariff barriers, extreme development gaps among member states, and a dysfunctional consensus-based decision-making mechanism (ASEAN Way). These structural conditions lead to suboptimal implementation of regional economic policies. This study concludes that institutional strengthening, regulatory harmonization, digital transformation acceleration, and reduction of development disparities are necessary prerequisites for a more effective and inclusive economic integration in ASEAN.*

Keywords : ASEAN Economic Community, economic integration, non-tariff barriers, development gap, ASEAN Way

Received April 14, 2026; Revised April 15, 2026; Accepted April 16, 2026

*Corresponding author bagas.maulana2857@student.unri.ac.id

Abstrak. Integrasi ekonomi kawasan tetap menjadi strategi sentral dalam meningkatkan daya saing global, sebagaimana diwujudkan melalui ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara. Namun, tingkat integrasi ASEAN masih sangat rendah dibandingkan kawasan lain, dengan perdagangan intra-ASEAN stagnan di angka 21,2% dari total perdagangan pada 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor struktural yang menghambat integrasi ekonomi ASEAN serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat AEC pasca-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, berlandaskan Teori Konstruktivisme Sosial Amitav Acharya (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya integrasi disebabkan oleh proliferasi hambatan non-tarif, kesenjangan pembangunan yang ekstrem antarnegara anggota, serta disfungsi mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus (ASEAN Way). Kondisi-kondisi struktural tersebut menyebabkan implementasi kebijakan ekonomi regional berjalan tidak optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, percepatan transformasi digital, dan pengurangan kesenjangan pembangunan merupakan prasyarat utama untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih efektif dan inklusif di kawasan ASEAN.

Kata Kunci : ASEAN Economic Community, integrasi ekonomi, hambatan non-tarif, kesenjangan pembangunan, ASEAN Way

LATAR BELAKANG

Fenomena regionalisme ekonomi telah menjadi suatu hal yang utama dalam pembentukan politik global kontemporer. Ketidakpastian dalam sistem perdagangan multilateral, membuat setiap kawasan yang ada di dunia mulai untuk melakukan tindakan dalam memperkuat integrasi internal dengan tujuan meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi. Di Asia Tenggara, ambisi dalam menguatkan integrasi ekonomi diwujudkan dalam pembentukan Asean Economic Community (AEC). AEC, dirancang untuk melakukan perubahan kawasan menjadi pasar yang tunggal dan dengan dasar produksi yang kompetitif, sehingga terintegrasi secara global yang memiliki pembangunan ekonomi yang merata. Pada dasarnya ketika membahas mengenai pasar bebas yang terintegrasi secara penuh, kerap kali menuju pada Uni Eropa sebagai standar dari berhasilnya integrasi regional.

Uni Eropa telah berhasil dalam mencapai tahap integrasi ekonomi dalam kerja sama regionalnya, hal ini berawal dari free trade area, customs union, hingga common market dan monetary union. Keberhasilan dari Uni Eropa didorong oleh mekanisme supranasionalitas, di mana kondisi negara-negara anggota Uni Eropa menyerahkan

sebagian kedaulatannya kepada institusi pusat untuk menciptakan regulasi yang mengikat berdasarkan hukum. Hal yang dimiliki oleh Uni Eropa berbanding terbalik dengan ASEAN yang bergerak di atas prinsip “ASEAN Way” yang merupakan sebuah norma dalam diplomasi yang lebih menekankan pada tindakan non-intervensi, konsensus, dan kerja sama antar pemerintah yang longgar tanpa adanya otoritas pusat yang memaksa.

Perbedaan fundamental dalam struktur kelembagaan kerja sama memicu perdebatan mengenai apakah apakah ASEAN memiliki kapasitas untuk berevolusi menjadi lembaga yang sebanding dengan Uni Eropa. Bagi ASEAN, tantangan utamanya bukan hanya pada penghapusan tarif, melainkan hambatan non tarif, standarisasi regulasi, serta keterhubungan digital yang masih timpang antar negara anggota. Selain itu juga perbedaan ekonomi yang lebar antar negara-negara anggota seperti Singapura dengan negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam menjadi hal yang menghambat dalam upaya sinkronisasi pasar.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hambatan struktural yang menyebabkan stagnannya integrasi ekonomi ASEAN melalui ASEAN Economic Community (AEC) dalam periode 2015–2024. Artikel ini menggunakan Teori Konstruktivisme Sosial yang dikembangkan oleh Amitav Acharya (2009), dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini ditulis dengan tujuan menganalisis jarak antara ambisi dan realitas dari ASEAN Economic Community, serta mengidentifikasi akar penyebab fragmentasi ekonomi yang terjadi di kawasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) Faktor-faktor struktural apa yang menghambat tercapainya integrasi ekonomi penuh dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC) pada periode 2015–2024? (2) Langkah-langkah reformasi apa yang diperlukan agar AEC dapat mendorong integrasi kawasan yang lebih efektif dan inklusif pasca-2025?

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Straus dan Corbin (2008) merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

Penelitian ini kami menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Data yang kami gunakan adalah data sekunder, yang dimana kami tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan mengumpulkan data dari sumber-sumber kredibel. Untuk mengolah data tersebut, kami melakukan teknik analisis isi yang dimana langkah sistematisnya: pertama reduksi data yang dimana kami memilah informasi mana yang relevan dengan hambatan yang dialami AEC dan mana yang tidak relevan. Kedua kategorisasi yang dimana kami mengelompokkan hambatan berdasarkan teori Acharya. Ketiga interpretasi yang dimana kami menghubungkan data yang kami dapat. Terakhir menarik kesimpulan. Batas penelitian kami mulai rentang waktu 2015-2024 yang dimana kami fokus ke negara yang ada di ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Perdagangan Intra-ASEAN

Aspirasi integrasi ekonomi Asia Tenggara bukanlah fenomena baru. Perjalanan ini dimulai secara formal melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang berfokus pada liberalisasi tarif. Evolusi besar terjadi pada tahun 2007 dengan peluncuran Cetak Biru AEC yang awalnya menargetkan integrasi penuh pada tahun 2020. Namun, dalam upaya ambisius untuk mempercepat posisi ASEAN di kancah global, para pemimpin memajukan tenggat waktu tersebut menjadi 31 Desember 2015. Saat ini, kita bergerak di bawah panduan Cetak Biru AEC 2025 yang bertujuan memperdalam integrasi yang telah dimulai.

Tujuan akhir AEC 2025 dirangkum dalam lima pilar utama yang membentuk visi masyarakat ASEAN ke depan yakni ekonomi terintegrasi secara kuat dan kohesif yang menjamin kelancaran aliran barang jasa investasi serta tenaga kerja terampil antar-negara anggota ASEAN kompetitif inovatif dan dinamis melalui penguatan kebijakan persaingan perlindungan hak kekayaan intelektual serta hak konsumen guna menciptakan ekosistem bisnis yang sehat konektivitas ekonomi dan kerja sama sektoral yang menyatukan infrastruktur fisik serta digital mulai dari sektor energi hingga perdagangan elektronik ASEAN yang tangguh inklusif dan berpusat pada masyarakat dengan memastikan manfaat ekonomi merata hingga UMKM serta mengurangi disparitas pembangunan serta ASEAN yang berorientasi global untuk mempertahankan posisinya sebagai pusat krusial dalam rantai produksi dan forum ekonomi internasional.

Dalam evaluasi ekonomi, kita harus membedakan antara pertumbuhan nilai total dan tingkat integrasi internal. Di dalam data “Laporan Integrasi ASEAN 2019” menunjukkan bahwa meskipun volume perdagangan ASEAN secara keseluruhan tumbuh masif, porsi perdagangan antar sesama anggota (intra-ASEAN) cenderung stagnan. Hal ini mencerminkan fenomena "Multilateralisasi Keterbukaan", di mana negara anggota menggunakan ASEAN sebagai batu loncatan untuk berdagang dengan pasar global (Tiongkok, AS, EU) daripada hanya berfokus pada pasar domestik regional.

Data menunjukkan stagnasi yang mengkhawatirkan dalam integrasi perdagangan ASEAN. Pada 2024, perdagangan intra-ASEAN hanya mencapai sekitar 21,2% dari total perdagangan kawasan. Hampir tidak berubah dari posisi 22% pada 2015, tahun AEC resmi diluncurkan. Perbandingan dengan EU semakin menajamkan kontras ini: perdagangan intra-EU mencapai 60% dari total perdagangan anggotanya hampir tiga kali lipat angka ASEAN. Selama 2003–2023, perdagangan intra-ASEAN tumbuh rata-rata 7,4% per tahun, sementara perdagangan ekstra-ASEAN tumbuh 8,2% per tahun—mengindikasikan bahwa negara-negara ASEAN secara sistematis lebih mengintegrasikan diri dengan mitra eksternal (terutama China dan AS) dibandingkan dengan sesama anggota. Pada 2023, total perdagangan ASEAN menurun 7,4% menjadi USD 3,6 triliun, dengan perdagangan intra-ASEAN turun lebih tajam sebesar 10,1%.

Studi Komparatif: ASEAN vs Uni Eropa (EU)

Perbandingan antara ASEAN Economic Community (AEC) dan Uni Eropa (EU) menunjukkan perbedaan mendasar dalam kedalaman integrasi ekonomi regional. EU telah mencapai tahap integrasi penuh melalui pasar tunggal (single market) dengan kebijakan moneter bersama, kebebasan pergerakan tenaga kerja, dan otoritas supranasional yang mengikat seluruh anggota. Sebaliknya, AEC beroperasi di atas prinsip non-intervensi dan konsensus (ASEAN Way), sehingga menghasilkan integrasi yang lebih longgar dan bersifat intergovernmental. Dalam aspek liberalisasi perdagangan, EU menerapkan common external tariff secara seragam, sedangkan AEC masih mengandalkan kerangka AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang implementasinya bervariasi antar negara anggota. Kesenjangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara ASEAN, seperti antara Singapura dan Myanmar, turut memperlemah konvergensi

kebijakan dibandingkan EU yang memiliki dana kohesi untuk meminimalkan disparitas regional.

Indikator	ASEAN/AEC (2024)	Uni Eropa (2024)
Perdagangan Intra-Regional (%)	21,2%	60%
Tahapan Integrasi (Balassa)	Free Trade Area (parsial)	Economic & Monetary Union
GDP Per Kapita (Terluas/Tersempit)	USD ~80.000 (SG) vs. USD ~1.700 (MM)	Lebih merata; >USD 10.000
Mekanisme Keputusan	Konsensus (ASEAN Way)	Qualified majority voting
Supranasionalitas	Sangat rendah	Tinggi (European Commission)
Penegakan Komitmen	Non-binding/rekomendasi	Binding law; infringement procedure
FDI Intra-Regional (USD M)	USD 30B (estimasi 2023)	USD 500B+ (intra-EU)
Jumlah Anggota / Populasi	10 negara / 685 juta jiwa	27 negara / 448 juta jiwa

Sumber: ASEAN Secretariat (2024), VNTR MOIT (2025), European Commission (2024), diolah penulis

Realisasi AEC : Proliferasi Hambatan Non-Tarif (NTB)

Salah satu pencapaian utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang paling sering dikutip adalah liberalisasi tarif melalui ASEAN Free Trade Area , di mana hampir seluruh tarif untuk produk asal ASEAN telah dihilangkan sejak Januari 2018. prestasi yang bahkan melampaui cakupan standar CPTPP dalam hal luasannya . Namun, paradoksnya muncul ketika penghapusan tarif ini disertai dengan proliferasi hambatan non-tarif (NTB). Lebih dari 50% NTB aktif di ASEAN terkonsentrasi pada dua kategori utama: Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT) , dengan Thailand memiliki sekitar 20 kali lebih banyak ukuran SPS dibandingkan Kamboja dan Laos . Tren ini terus meningkat, di mana ERIA NTB Database 2023 mencatat total 5,200+ NTB aktif naik 20% sejak 2020, SPS mencapai 55% dan TBT 28% dari keseluruhan, serta Thailand memimpin dengan 1,456 measures SPS, sekitar 20-25 kali lebih banyak daripada Kamboja (67 measures) dan Laos (58 measures).

Di dalam Asian Journal of Comparative Politics menegaskan bahwa AEC berhasil meruntuhkan 'tembok tarif' hanya untuk menggantinya dengan 'tembok regulasi' yang sama menghambatnya , temuan yang dikonfirmasi oleh laporan ERIA State of ASEAN

Trade 2024 yang melaporkan peningkatan 18% NTB baru tahunan pasca-COVID, terutama di sektor agri-food. Fenomena ini diperparah oleh utilisasi AFTA yang rendah, di mana lebih dari 30% ekspor Thailand ke ASEAN tidak memanfaatkan skema preferensial akibat prosedur rumit dan aturan asal barang yang memberatkan. Data ASEAN Integration Monitoring Report 2023 menunjukkan utilisasi rata-rata hanya 65% turun dari 70% pada 2018. Secara keseluruhan, keberhasilan teknis AEC tampak terbatas dalam praktik, berpotensi memperlemah manfaat integrasi bagi komunitas rentan seperti petani kecil dan UMKM di negara kurang maju (khususnya CLMV), di mana biaya kepatuhan SPS mencapai 15-20% dari nilai ekspor dan menghambat inklusi ekonomi, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi di kawasan.

Kesenjangan Pembangunan Ekonomi ASEAN-6 vs CLMV.

Asimetri pembangunan ekonomi di ASEAN merupakan salah satu faktor struktural paling persisten yang menghambat pencapaian integrasi pasar tunggal. Pada 2024, PDB per kapita Singapura mencapai sekitar USD 80.000, sementara Myanmar hanya USD 1.700, menghasilkan rasio kesenjangan 47:1. Ekstrem yang tidak tertandingi oleh blok ekonomi regional lain, seperti Uni Eropa di mana rasio PDB per kapita tertinggi (Luxembourg) dan terendah (Bulgaria) hanya sekitar 7:1 (IMF, 2024). Studi AFD-ADBI mengungkapkan bahwa negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) menanggung biaya kepatuhan non-tariff barriers 2–3 kali lebih tinggi dibandingkan ASEAN-6, akibat keterbatasan kapasitas teknis, infrastruktur pengujian, dan sumber daya manusia. Ketimpangan ini menghasilkan pasar tunggal yang asimetris, di mana aliran barang cenderung searah dari ASEAN-6 ke CLMV karena ketidakmampuan CLMV memenuhi standar ekspor yang ditetapkan. Akibatnya, integrasi ekonomi justru memperlemah pemerataan, bertentangan langsung dengan Pilar III ASEAN Economic Community (AEC) mengenai equitable economic development.

Disfungsi Mekanisme Konsensus (ASEAN Way)

Prinsip ASEAN Way yang menekankan non-intervensi, musyawarah, dan konsensus telah menjadi fondasi utama kohesi ASEAN selama lebih dari lima dekade. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa norma ini justru menghambat reformasi mendalam dalam integrasi ekonomi regional. Acharya (2009) menyoroti bahwa norma-norma tersebut menimbulkan path dependency yang menyulitkan manuver supranasional.

Secara operasional, mekanisme konsensus memberikan hak veto efektif kepada setiap negara anggota terhadap kebijakan apa pun, sehingga komitmen mengikat dalam ASEAN Economic Community (AEC) sering kali dinegosiasikan pada tingkat lowest common denominator yaitu komitmen minimal yang dapat diterima semua pihak. Ilustrasi empiris yang mencolok adalah kegagalan ASEAN untuk mengeluarkan Joint Communiqué pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) 2012, akibat veto de facto oleh Kamboja, yang menunjukkan kerentanan agenda kawasan terhadap satu anggota. Leviter (2011), dalam *New York University Journal of International Law and Politics*, menyimpulkan bahwa ketidakmasukan mekanisme voting mayoritas dalam ASEAN Charter merupakan peluang reformasi kelembagaan yang terlewatkan secara krusial. Meskipun demikian, elemen reformasi parsial seperti penerapan qualified majority voting di domain tertentu menunjukkan potensi adaptasi bertahap.

Oleh karena itu, temuan di atas mengkonfirmasi bahwa tiga faktor struktural utama menghambat integrasi penuh AEC dalam periode 2015–2024: (1) proliferasi hambatan non-tarif yang menggantikan peran tarif sebagai penghalang perdagangan — terbukti dari lebih dari 5.200 NTB aktif pada 2023 yang naik 20% sejak 2020; (2) kesenjangan pembangunan yang ekstrem antara ASEAN-6 dan CLMV, dengan rasio PDB per kapita 47:1, yang menghasilkan asimetri kapasitas dan ketidakmampuan negara kurang maju untuk memenuhi standar regional; dan (3) disfungsi mekanisme konsensus ASEAN Way yang —sebagaimana dianalisis melalui kerangka Konstruktivisme Sosial Acharya (2009)— menciptakan path dependency kelembagaan yang menghambat lahirnya komitmen ekonomi yang mengikat. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan menghasilkan kondisi di mana perdagangan intra-ASEAN stagnan di angka 21,2% pada 2024, nyaris tidak berubah dari posisi 2015. Menjawab pertanyaan penelitian kedua, reformasi yang diperlukan bukan sekadar teknis, melainkan juga transformasi normatif: selama ASEAN Way tidak direformasi untuk mengakomodasi mekanisme pengambilan keputusan yang lebih efektif, target AEC 2040 berpotensi mengulang kegagalan serupa periode 2015–2024. Reformasi konkret yang dibutuhkan dijabarkan dalam bagian rekomendasi kebijakan berikut.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan perkembangan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, reformasi AEC pasca-2025 seharusnya tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya memperluas perdagangan bebas semata, tetapi sebagai proses pembenahan yang lebih menyeluruh terhadap cara kerja integrasi kawasan. Indonesia sendiri pernah menekankan pentingnya Mid Term Review terhadap Cetak Biru ASEAN 2025 karena evaluasi seperti itu dianggap perlu untuk melihat output, outcome, dan dampak nyata dari proses integrasi ekonomi, sekaligus menyelesaikan agenda yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. Dari situ dapat dipahami bahwa AEC ke depan perlu bergerak dari sekadar target normatif menuju pelaksanaan yang lebih terukur, konsisten, dan bisa dirasakan langsung oleh negara-negara anggota.

Penguatan kelembagaan ASEAN

Salah satu langkah yang paling penting adalah memperkuat kelembagaan ASEAN agar koordinasi ekonomi tidak hanya bergantung pada komitmen politik sesaat dari masing-masing negara anggota. Dalam praktiknya, ASEAN membutuhkan mekanisme yang lebih jelas untuk memantau keterlaksanaan kebijakan, mengevaluasi prioritas tahunan, dan memastikan bahwa agenda yang sudah disepakati benar-benar dijalankan sampai tuntas. Hal ini relevan karena Indonesia pada forum AEC juga pernah menyoroti bahwa tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 sempat berada di kisaran 60 persen, sehingga dibutuhkan pembaruan informasi secara periodik agar implementasi di tingkat nasional maupun kawasan bisa berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penguatan kelembagaan bukan berarti ASEAN harus berubah total menjadi organisasi supranasional seperti Uni Eropa, tetapi lebih kepada mempertegas fungsi koordinasi, pengawasan, dan kesinambungan kebijakan agar integrasi ekonomi tidak mudah terhambat oleh perubahan kepentingan politik domestik di negara anggota.

Harmonisasi regulasi dan pengurangan hambatan non-tarif

Reformasi AEC pasca-2025 juga perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi dan pengurangan hambatan non-tarif, karena pada tahap ini tantangan utama kawasan sudah tidak lagi hanya soal tarif masuk barang, melainkan juga soal perbedaan standar, prosedur, dan aturan yang sering kali membuat arus barang dan jasa menjadi tidak efisien. Indonesia pada tahun 2023 bahkan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dijawab ASEAN bersama, termasuk bagaimana menghadapi gejala deglobalization,

decoupling, dan de-risking, serta bagaimana menyiapkan pengelolaan risiko agar sentralitas ASEAN tetap terjaga. Selain itu, Indonesia juga mendorong penyusunan ASEAN Digital Framework Agreement sebagai bagian dari agenda yang perlu segera diproses, yang menunjukkan bahwa integrasi ekonomi ke depan memang menuntut penyamaan aturan lintas negara agar kawasan bisa lebih siap menghadapi ekonomi global yang makin kompetitif. Karena itu, AEC pasca-2025 sebaiknya menempatkan standardisasi regulasi, penyederhanaan prosedur perdagangan, serta penguatan kerja sama teknis sebagai agenda inti, bukan sekadar pelengkap.

Percepatan transformasi digital Kawasan

Di era sekarang, integrasi ekonomi kawasan tidak akan berjalan kuat kalau konektivitas digitalnya masih timpang, sebab ekonomi modern sangat bergantung pada sistem pembayaran, interoperabilitas platform, dan kemampuan negara-negara anggota untuk saling terhubung secara cepat dan aman. Bank Indonesia menegaskan bahwa ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia maupun ASEAN menunjukkan tren positif, tetapi pada saat yang sama juga terdapat tantangan berupa persepsi biaya yang mahal, proses yang lama, serta variasi regulasi dan spesifikasi pembayaran di setiap negara. Di sisi lain, BI juga menjelaskan bahwa QRIS Cross-Border merupakan perwujudan visi Indonesia untuk standarisasi infrastruktur perdagangan internasional dan sistem pembayaran ritel, serta diharapkan menjadi sistem pembayaran regional yang aman, kompetitif, dan lebih efisien. Artinya, reformasi AEC pasca-2025 perlu lebih serius mendorong konektivitas pembayaran lintas negara, penguatan infrastruktur digital, dan perluasan ekosistem ekonomi digital agar integrasi kawasan tidak hanya berhenti pada wacana pasar tunggal, tetapi benar-benar hadir dalam aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat dan pelaku usaha.

Pengurangan kesenjangan pembangunan antarnegara anggota

Rekomendasi lain yang tidak kalah penting adalah memperkecil kesenjangan pembangunan antarnegara ASEAN, karena integrasi ekonomi hanya akan efektif bila seluruh anggota punya kapasitas yang relatif seimbang untuk ikut dalam persaingan pasar regional. Indonesia pernah menekankan bahwa MTR Cetak Biru ASEAN 2025 sangat penting untuk melihat dampak integrasi ekonomi dan untuk menyelesaikan carry-over dari prioritas yang belum sempat diimplementasikan, yang pada dasarnya menunjukkan

bahwa masih ada ketimpangan kemampuan implementasi di antara negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu, AEC pasca-2025 seharusnya memperkuat program bantuan teknis, pembangunan kapasitas, dan dukungan infrastruktur bagi negara-negara yang masih tertinggal, supaya integrasi tidak hanya menguntungkan negara dengan ekonomi paling maju, tetapi juga memberi ruang yang lebih adil bagi negara-negara dengan daya saing yang lebih rendah. Kalau kesenjangan ini bisa diperkecil, maka pasar ASEAN akan lebih stabil, lebih inklusif, dan lebih siap untuk menghadapi tekanan ekonomi global yang berubah dengan cepat.

KESIMPULAN

Integrasi ekonomi ASEAN melalui ASEAN Economic Community (AEC) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan daya saing kawasan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga tingkat integrasi ekonomi ASEAN relatif rendah sejak peluncuran AEC pada tahun 2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa stagnasi perdagangan intra-ASEAN dipengaruhi oleh meningkatnya hambatan non-tarif, kesenjangan pembangunan ekonomi antara negara ASEAN-6 dan CLMV, serta disfungsi prinsip ASEAN Way yang memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Selain itu, permasalahan integrasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan norma antarnegara anggota, sehingga pendekatan integrasi yang longgar belum mampu menciptakan pasar tunggal yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan AEC di masa depan memerlukan reformasi yang lebih adaptif dan progresif melalui penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, percepatan transformasi digital, serta pengurangan kesenjangan pembangunan agar integrasi ekonomi ASEAN dapat berjalan lebih optimal, kompetitif, dan inklusif di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, A. (2009). *Constructing A Security Community In Southeast Asia: ASEAN And The Problem Of Regional Order*. Routledge.

AFD-ADBI. (2018). *Trade Integration Within ASEAN: The Role Of Ntms For CLMV*. Asia-Pacific Research And Training Network On Trade (Artnet). Academic Research Repository.

AKHIR, T. K. (2018). *DINAMIKA INTERPRETASI DAN PRAKTIK ASEAN WAY*.

- ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Diakses Dari Situs Resmi ASEAN: <https://asean.org/Wp-Content/Uploads/2015/11/AEC-Blueprint-2025.Pdf>
- ASEAN Secretariat. (2023). ASEAN Integration Monitoring Report 2023. <https://asean.org/Wp-Content/Uploads/2023/12/AIMR-2023-Full-Report.Pdf>
- Asian Trade Centre. (2016). The Role Of Non-Tariff Measures In Achieving AEC Blueprint 2025. Talking Trade Blog. <https://asiantradecentre.org/Talkingtrade/2016/4/4/The-Role-Of-Non-Tariff-Measures>
- Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2022). EBOOK The Economics Of European Integration 7e. McGraw Hill.
- Bank Indonesia. (2023). Bank Indonesia Bersama Industri Dorong Pembayaran Lintas Negara Untuk Perkuat Ekonomi ASEAN.
- Bank Indonesia. (2024). Win-Win Solution QRIS Cross-Border.
- ERIA. (2023). NTB Database 2023. Economic Research Institute For ASEAN And East Asia. <https://www.eria.org/Uploads/2023/12/ERIA-NTB-Database-2023.Pdf>
- European Union. (N.D.). The History Of The European Union. Diakses Dari Situs Resmi Europa.Eu: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_en
- <https://ekoves.ekon.go.id/Kegiatan/Preparatory-Seom-22nd-Asean-Economic-Community-Aec-Council-Meeting>
- <https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Ruang-Media/Cerita-Bi/Pages/Win-Win-Solution-Qris-Cross-Border.aspx>
- https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Ruang-Media/News-Release/Pages/Sp_2512123.aspx
- <https://www.ekon.go.id/Publikasi/Detail/786/Pertemuan-Dewan-Mea-Indonesia-Dorong-Negara-Negara-Asean-Tuntaskan-Isu-Isu-Prioritas-Dan-Persempit-Kesenjangan>
- Institut Montaigne. (2025). Explainer: Scenarios China 2035: The Chances Of Success. <https://www.aseanstats.org/Wp-Content/Uploads/2024/05/ASB-202405-03.Pdf>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). Pertemuan Dewan MEA: Indonesia Dorong Negara-Negara ASEAN Tuntaskan Isu-Isu Prioritas Dan Persempit Kesenjangan.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). Preparatory-SEOM 22nd ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting.
- Menon, J., Todd, L., Hashim, A. W., & Alias, A. W. (2019). Laporan Integrasi ASEAN 2019: Inisiatif Kemakmuran ASEAN (Laporan No. 03). Institute For Democracy And Economic Affairs (IDEAS) & Friedrich Naumann Foundation For Freedom.
- Murdiyanto, Eko. METODE PENELITIAN KUALITATIF (Yogyakarta,2020) . Hal 19
- Narjoko, D. (2015). AEC Blueprint Implementation Performance And Challenges: Non-Tariff Measures And Non-Tariff Barriers. ERIA Discussion Paper Series, (2015-36).
- SEAN Secretariat. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. <https://Asean.Org/Book/Asean-Economic-Community-Blueprint-2025/>
- VNTR MOIT Vietnam. (2025). ASEAN Aims To Strengthen Intra-Regional Trade Linkages To Enhance The Region's Economic Resilience. Ministry Of Industry And Trade Of Vietnam. <https://Vntr.Moit.Gov.Vn/News/Asean-Aims-To-Strengthen-Intra-Regional-Trade-Linkages>
- World Trade Organization (WTO). (2023). World Trade Report 2023: Re-Globalization For A Secure, Inclusive And Sustainable Future. Diakses Dari: https://Www.Wto.Org/English/Res_E/Publications_E/Wtr23_E.Htm
- WTO. (2024). Trade Policy Review: ASEAN. World Trade Organization. https://Www.Wto.Org/English/Tratop_E/Tpr_E/S425_E.Pdf
- Yanuar, Ikbar. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. (Bandung: Refika Editama, 2021). Hlm. 202
- Yoshimatsu, H. (2021). The ASEAN Economic Community And ASEAN Economic Integration. Asian Journal Of Comparative Politics, 6(2), 123–140. <https://Doi.Org/10.1080/24761028.2021.1891702>